

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Mahmudi (2010) mendefinisikan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Menurut Supriyono (2000) mendefinisikan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut. Menurut Handoko (2003) mendefinisikan bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas diartikan tercapainya sasaran, tujuan atau hasil kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya atau dengan kata lain efektivitas merupakan perbandingan antara hasil dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya.

2.1.2 Indikator Efektivitas Sistem Informasi

Efektivitas Sistem Informasi dapat diukur dengan menentukan indikator-indikator yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Menurut Bodnar (2000) menjabarkan beberapa indikator efektivitas sistem informasi berbasis teknologi sebagai berikut:

1. Indikator keamanan data berhubungan dengan pencegahan bencana, baik karena bencana alam, tindakan disengaja, maupun kesalahan manusia dan tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam mengantisipasi akses ilegal dan kerusakan pada sistem.
2. Indikator waktu berhubungan dengan kecepatan dan ketepatan informasi dalam permintaan pemakaian sistem. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam memproses data menjadi suatu laporan, baik secara periodik maupun nonperiodik, untuk rentang waktu yang telah ditentukan.
3. Indikator ketelitian berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan keluaran informasi. Pada volume data yang besar biasanya terdapat dua jenis kesalahan, yakni kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan.
4. Indikator variasi laporan atau *output* berhubungan dengan kelengkapan isi informasi. Dalam hal ini tidak hanya mengenai volumenya, tetapi juga mengenai informasinya. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi untuk membuat suatu laporan

dengan pengembangan dan perhitungan sesuai dengan kebutuhan yang berguna bagi pengguna informasi.

5. Indikator relevansi menunjukkan manfaat yang dihasilkan dari produk atau keluaran informasi, baik dalam analisis data, pelayanan, maupun penyajian data. Indikator relevansi menunjukkan kesesuaian dan manfaat laporan yang dihasilkan.

2.2 Konsep Sistem

2.2.1 Pengertian Sistem

Menurut Sutabri (2004) Sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Sumarsan (2010) Sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. Menurut Kwary (2007) Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai tujuan. Menurut Mulyani (2016) Sistem adalah adalah sekumpulan sub sistem, komponen yang saling bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan *ouput* yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurut Jogiyanto (2009) Sistem adalah kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat di simpulkan bahwa sistem adalah suatukumpulan komponen dari subsistem yang saling bekerja sama untuk menghasilkan *output* dalam mencapai tujuan tertentu.

2.2.2 Karakteristik Sistem

Sistem memiliki konsep yang sederhana yaitu masukan dan keluaran, akan tetapi sistem juga memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yang mencirikan bahwa hal tersebut bisa dikatakan menjadi sebuah sistem.

Menurut Sutabri (2004:12) dalam bukunya “Analisa Sistem Informasi”. Adapun karakteristik Sistem sebagai berikut:

a. Komponen Sistem (*Components*).

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang bekerjasama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem. Setiap subsistem memiliki sifat-sifat sistem yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan.

b. Batasan Sistem (*Boundary*).

Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

c. Lingkungan Luar Sistem (*Environment*).

Lingkungan luar sistem adalah bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem ini dapat menguntungkan karena merupakan

energi bagi sistem yang harus selalu dijaga dan dipelihara sedangkan lingkungan luar sistem yang merugikan harus dikendalikan, jika tidak dapat mengganggu kelangsungan hidup sistem tersebut.

d. Penghubung Sistem (*Interface*).

Penghubung sistem adalah media yang menghubungkan sistem dengan subsistem. Penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lain. Keluaran suatu subsistem akan menjadi masukan untuk subsistem yang lain dengan melewati penghubung.

e. Masukan Sistem (*Input*).

Masukan sistem adalah energi yang dimasukkan kedalam sistem, yang dapat berupa pemeliharaan (*maintenance input*) dan sinyal (*signal input*).

f. Keluaran Sistem (*Output*).

Hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang lain.

g. Pengolahan Sistem (*Procces*).

Untuk dapat mengolah masukan menjadi keluaran diperlukan suatu pengolah yang dinamakan dengan pengolah sistem.

h. Sasaran Sistem (*Objective*).

Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang menentukan *input* yang dibutuhkan oleh sistem dan keluaran yang dihasilkan.

2.2.3 Elemen Sistem.

Menurut Kadir (2014:62), elemen-elemen yang membentuk sebuah sistem yakni:

a. Tujuan.

Setiap sistem memiliki tujuan, tujuan inilah yang menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Setiap sistem informasi memiliki tujuan yang berbeda-beda. Akan tetapi, tujuan utama yang umum ada tiga macam yakni:

1. Untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen
2. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen
3. untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan

b. Masukan.

Masukan (*input*) sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan akan menjadi bahan untuk diproses.

c. Keluaran.

Keluaran (*output*) merupakan hasil pemrosesan yang berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan dan sebagainya.

d. Proses.

Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna.

e. Mekanisme Pengendalian dan Umpan Balik.

Mekanisme pengendalian diwujudkan dengan menggunakan umpan balik. Umpan balik digunakan untuk mengendalikan baik masukan

maupun proses yang bertujuan untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan.

2.3 Konsep Informasi

2.3.1 Pengertian Informasi

Menurut Romney (2015) Informasi adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Menurut Jogiyanto (2009) Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Menurut Davis (1999) Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat di simpulkan bahwa informasi adalah data yang telah diolah dan disajikan menjadi bentuk yang berarti berdasarkan kejadian-kejadian nyata untuk pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang bagi yang menerimanya.

2.3.2 Fungsi Informasi

Fungsi utama informasi adalah menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Informasi yang disampaikan kepada pemakai merupakan hasil data yang dimasukkan kedalam pengolahan. Akan tetapi kebanyakan pengambilan keputusan yang kompleks, informasi hanya dapat menambah kemungkinan kepastian atau mengurangi bermacam-macam pilihan. (Sutabri, 2004: 24).

2.3.3 Jenis-Jenis Informasi

1. Informasi Berdasarkan Persyaratan

a. Informasi yang tepat waktu.

Pada hakikatnya makna dari informasi yang tepat waktu adalah bahwa informasi sudah ada ditangan manajer sebelum suatu keputusan diambil. Informasi adalah bahan pengambilan keputusan.

b. Informasi yang relevan.

Informasi yang disampaikan haruslah relevan, berkaitan dengan kepentingan penerima sehingga informasi tersebut akan mendapat perhatian. Semakin erat kaitan suatu informasi dengan kepentingan penerima, akan semakin besar perhatian yang diberikan kepadanya. Informasi yang tidak relevan jelas tidak akan mendapat perhatian dari penerima informasi.

c. Informasi yang bernilai.

Informasi yang bernilai adalah informasi yang berharga untuk suatu pengambilan keputusan. Keputusan sendiri merupakan hasil pemilihan dari sejumlah alternatif yang paling kecil risikonya.

d. Informasi yang dapat dipercaya.

Suatu informasi harus dapat dipercaya, karena menyangkut citra organisasi dimana manajemen digiatkan dan informasi yang disampaikan baik kepada seseorang maupun kesuatu organisasi harus betul-betul diyakini kebenarannya.

2. Informasi Berdasarkan Dimensi Waktu

a. Informasi masa lalu

Informasi jenis ini adalah informasi mengenai peristiwa lampau yang meskipun amat jarang dipergunakan, namun data perlu disusun secara rapi dan teratur.

b. Informasi masa kini

Informasi masa kini adalah informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang.

3. Informasi Berdasarkan Sasaran

a. Informasi individual

Informasi individual adalah informasi yang ditujukan kepada seseorang yang mempunyai fungsi sebagai pembuat kebijaksanaan dan pengambil keputusan.

b. Informasi komunitas

Informasi komunitas adalah informasi yang ditujukan kepada khalayak di luar organisasi, suatu kelompok tertentu di masyarakat.

2.4 Konsep Sistem Informasi

2.4.1 Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi adalah kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. (Alter 1992 dalam Abdul Kadir)

Sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk

informasi yang berguna. (Bodnar dan Hopwood 1990 dalam Abdul Kadir)

Sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai. (Gelinas, Oram dan Wiggins 1990 dalam Abdul Kadir)

Sistem informasi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. (Turban, McLean dan Wetherbe 1999 dalam Abdul Kadir)

Sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya (manusia, komputer) untuk mengubah masukan (input) menjadi keluaran (informasi) guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. (Wilkinson 1992 dalam Abdul Kadir)

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan komponen sistem yaitu *software*, *hardware* dan *brainware* yang memproses informasi menjadi sebuah *output* yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam organisasi.

2.4.2 Komponen dan Tipe Sistem Informasi

Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan istilah blok bangunan (*building block*) yang terdiri dari:

a. Blok masukan (*input block*).

Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input disini termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar.

b. Blok model (*model block*).

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan.

c. Blok keluaran (*output block*).

Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem.

d. Blok teknologi (*technology block*).

Teknologi merupakan tool box dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran serta membantu pengendalian sistem secara keseluruhan.

- e. Blok basis data (*database block*).

Basis data merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan diperangkat keras komputer dan perangkat lunak digunakan untuk memanipulasinya.

- f. Blok kendali (*control block*).

Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi, seperti bencana alam, api, air, debu. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat langsung cepat diatasi.

2.5 Konsep Keuangan Daerah

2.5.1 Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Mamesh (1995), Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.

Dari definisi tersebut terdapat dua hal yang perlu di jelaskan yaitu:

1. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti: Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan meningkatkan kekayaan daerah.
2. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.

2.6 Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah

2.6.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam pasal 2 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Hak- hak daerah memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga
3. Penerimaan daerah
4. Pengeluaran daerah
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemda dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemda dan/atau kepentingan umum.

2.6.2 Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Pasal 4

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif dan ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4. Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil
5. Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
6. Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

7. Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
8. Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
9. Keadilan sebagaimana pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.
10. Kepatuhan sebagaimana pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
11. Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif dan ekonomis, transparan, dan akuntabilitas dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegritas yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

2.7 Konsep Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

2.7.1 Pengertian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

(www.djkd.kemendagri.go.id:2012)

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) juga merupakan salah satu manifestasi Kementerian Dalam Negeri terhadap pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, berkaitan dengan penguatan persamaan persepsi dalam interpretasi dan implementasi berbagai peraturan perundang-undangan dalam bentuk sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Program Aplikasi SIPKD juga merupakan Aplikasi dalam proses pengelolaan keuangan daerah yang pelaksanaannya di Pemerintah proses untuk melakukan penerbitan buku Perda pada saat itu juga SIPKD dapat langsung mencetaknya, dengan kata lain inputan awal, jika data RKA OPD

sudah final maka RKA dan buku Perda, Pergub APBD bisa dicetak secara otomatis baik per OPD maupun Per Pemda.

Dalam Modul Penganggaran ini juga data DPA semua OPD baik DPA Pendapatan, DPA Belanja Langsung, DPA Belanja Tidak Langsung dan DPA Pembiayaan (Penerimaan dan Pengeluaran) tidak perlu melakukan input data ulang, tetapi hanya melakukan transfer data dari RKA menjadi DPA sehingga data RKA sama dengan data DPA APBD (Perda dan Pergub) pada saat itu juga DPA bisa langsung dicetak.

Daerah Kota Kupang sesuai dengan Surat Edaran MendagriNo.900.122.BAKD tentang “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Dan Implementasi SIPKD Dan Regional SIKD” dan Surat Edaran Mendagri Lainnya Tentang Implementasi SIPKD yaitu Surat Edaran No.900.806.BAKD, Surat Edaran No.900.360.BAKD.

Maksud dan Tujuan dari pelaksanaan Implementasi Program Aplikasi SIPKD ini adalah dapat terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah dengan basis komputerisasi dan terintegrasi sehingga proses Pengelolaan Keuangan Daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien mulai dari proses Penyusunan APBD, Pelaksanaan APBD serta Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Aplikasi SIPKD ini berbasiskan pada regulasi pusat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah

2.7.2 Tujuan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Sesuai dengan tujuan dibangunnya aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), maka penggunaannya ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penyelenggaraan SIPKD dilaksanakan dalam rangka membantu memudahkan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan akuntansi dan pelaporan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pemerintah Pusat menyelenggarakan penerapan aplikasi SIPKD secara nasional dengan tujuan:

1. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;
2. Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional;
3. Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pengendalian Defisit Anggaran; dan
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan defisit anggaran daerah.

2.7.3 Fungsi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Aplikasi SIPKD merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses-proses yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat OPD. Adapun fungsi aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah sebagai berikut:

1. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan data keuangan daerah.
2. Menyusun laporan keuangan lebih efektif dan akurat
3. menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya.
4. Menyajikan informasi yang akurat

2.7.4 Ruang Lingkup Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Aplikasi valid 49 yaitu aplikasi yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses-proses yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah baik pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) antara lain:

1. Penyusunan Anggaran
2. Pelaksanaan Anggaran
3. Penyusunan Anggaran Perubahan
4. Penyusunan Pertanggungjawaban Anggaran

Aplikasi valid 49 terdiri dari beberapa modul antara lain:

- a. 3 (tiga) modul utama, yaitu Modul Penganggaran, Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan, Modul Akuntansi dan Pelaporan
- b. 2 (dua) penunjang, yaitu Modul *Utility* dan Modul Data *Master*.

Modul-Modul SIPKD

1. Modul *Utility*

Modul *Utility* adalah modul penunjang bagi 3 modul utama dalam beberapa hal terkait pengoperasian aplikasi secara umum.

2. Modul Data *Master*

Selain Modul *Utility*, Modul Data *Master* juga termasuk modul penunjang bagi 3 modul utama dalam beberapa hal terkait pengoperasian aplikasi, tetapi dalam modul ini, keterkaitan data-data pada modul utama sangat erat dengan data-data yang dihasilkan dari menu-menu pada modul data master ini.

3. Modul Penganggaran

Modul Penganggaran adalah aplikasi yang disiapkan untuk membantu proses penyusunan dokumen-dokumen anggaran.

4. Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan

Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan adalah alat bantu aplikasi guna mendukung proses pelaksanaan APBD terkait penerbitan dan pencatatan dokumen-dokumen.

5. Modul Akuntansi dan Pelaporan

Modul Akuntansi dan Pelaporan adalah alat bantu aplikasi guna mendukung pelaksanaan akuntansi daerah.

Perlu diketahui bahwa ke 5 (lima) modul tersebut saling terkait satu sama lainnya. Keterkaitan modul-modul tersebut dihubungkan pada beberapa data yang secara langsung digunakan oleh beberapa modul tertentu di beberapa menu. Modul *Utility* dan Modul *Data Master* dikatakan sebagai modul penunjang, hal ini dikarenakan kedua modul tersebut secara struktur data dan aliran menu menunjang terhadap kebutuhan modul utama atau dengan kata lain akan terdapat permasalahan dalam prosesnya jika data pada Modul *Data Master* dan Modul *utility* tidak dilaksanakan terlebih dahulu.

2.8 Penelitian Terdahulu.

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	I Made Suyana Utama (2012)	Analisis Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Pemerintah Provinsi Bali	Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa penerapan SIPKD pada Pemerintah Provinsi Bali sudah efektif.
2	Ni Nengah Wartini (2014)	Analisis Efektivitas Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Pemerintah Kabupaten Jembrana	Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Pemerintah Kabupaten Jembrana berdasarkan persepsi pengguna adalah efektif dalam membantu pengelolaan keuangan daerah.
3	Wasja (2015)	Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Instansi Pemerintah Daerah	Terdapat perbedaan efektivitas SIPKD pada masing-masing aspek, terdapat perbedaan efektivitas SIPKD yang signifikan antara aspek hukum dengan aspek teknik operasional dan aspek manfaat.

2.9 Kerangka Pemikiran.

Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, maka dalam pelaksanaannya Badan Keuangan Daerah Kota Kupang yang merupakan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/122/BAKD Petunjuk Teknisi Pelaksanaan

Pengembangan dengan Implementasi SIPKD Regional SIKD menggunakan sebuah aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu Pemerintah Daerah Kota Kupang untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah.

Proses pengoperasian aplikasi SIPKD berdasarkan pada Modul *Utility*, Modul Data *Master*, Modul Penganggaran, Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Modul Akuntansi dan Pelaporan yang harus dilakukan secara berurutan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan merupakan pengolahan transaksi-transaksi yang ada pada modul sebelumnya yang dilaksanakan secara berurutan dan diinput secara harian sesuai dengan kejadian transaksinya untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, dari segi efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparan dan akuntabel.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi pengelolaan keuangan daerah terdapat beberapa indikator efektivitas sistem informasi yang perlu di perhatikan yakni keamanan data, waktu, ketelitian, variansi laporan atau *output* dan relevansi. Berdasarkan pernyataan diatas maka dikembangkanlah kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

